



BADAN PERHIMPUNAN HAKIM PEREMPUAN INDONESIA

IKATAN HAKIM INDONESIA

d/a : Sekretariat PP. IKAHI - MA RI Jln. Medan Merdeka Utara 9-13
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 24 September 2026

No : 4/SEMINAR BPHPI-
IKAHI/IX/2026

Hal : Mohon Penugasan

Lamp : 1 Berkas

Kepada Yth.:

1. Plt. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI
7. Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI

di

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara "Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI: Capaian, Tantangan & Harapan Ke Depan" serta "Seminar: Hakim Perempuan Dalam Transformasi Peradilan Digital - Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial Secara Etis dan Inklusif" yang akan diselenggarakan oleh Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) yang berada di bawah naungan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), pada:

Hari, Tanggal: Jumat, 2 Oktober 2026
Waktu : 08.00 - 11.30 WIB
Tempat : Offline Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia
Online Meeting ID : 948 1672 7780
Passcode : 084229

Dengan ini dimohon bantuannya agar menugaskan para hakim perempuan Indonesia sebagaimana daftar nama dalam lampiran surat ini untuk hadir secara langsung (*offline*) pada acara tersebut serta menginformasikan agar para hakim yang ditunjuk (Khusus Peserta) wajib melakukan **konfirmasi kehadiran pada link di bawah ini selambatnya tanggal 29 September 2026** dan apabila peserta yang ditunjuk berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka atasan langsung hakim

yang bersangkutan segera menunjuk peserta pengganti dan peserta pengganti segera melakukan konfirmasi sebelum tanggal tersebut di atas.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, apabila memerlukan informasi selanjutnya para peserta dapat menghubungi Kesekretariatan:

1. Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. 081342783398
2. Firris Barlian, S.Ag., M.H. 081265503974
3. Anita Linda Sugiarto, S.H., M.H. 081382006717

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

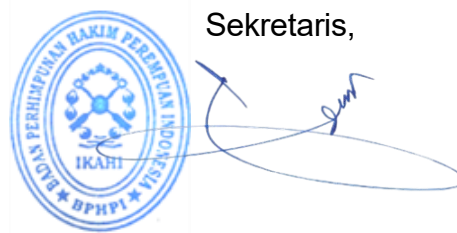
Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia.

Ketua,



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Umum PP IKAPI



Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.

Link Konfirmasi Kehadiran Peserta :

<https://forms.gle/CSsjyE9XYYmSNuzXA>

LAMPIRAN SURAT NO. 4/SEMINAR BPHPI-IKAHI/IX/2026

Lampiran I : Term Of Reference (TOR)
Surat Nomor : 02/ SEMINAR BPHPI-IKAHI/IX/2026
Tanggal : 21 September 2026

TERM OF REFERENCE (TOR) REFLEKSI PERJALANAN 3 TAHUN BPHPI: CAPAIAN, TANTANGAN & HARAPAN KE DEPAN & SEMINAR: HAKIM PEREMPUAN DALAM TRANSFORMASI PERADILAN DIGITAL - PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN KECERDASAN ARTIFISIAL SECARA ETIS DAN INKLUSIF

PENDAHULUAN

Peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan bukan lagi semata-mata merupakan agenda pemberdayaan perempuan, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, reformasi kelembagaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran perempuan dalam ruang-ruang kepemimpinan tidak cukup dipahami dari perspektif kuantitas atau keterwakilan semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih substantif, yaitu sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, memengaruhi kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan lembaga yang profesional, berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Asta Cita ke-4 Presiden Republik Indonesia, Prioritas Nasional ke-4 RPJMN Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa kesetaraan gender bukan sekadar persoalan sosial, melainkan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan merepresentasikan keragaman perspektif masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun dokumen strategis nasional berupa Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kesetaraan Gender (RAN PKG), yang memuat lima prioritas pembangunan kesetaraan gender. Salah satu di antaranya adalah Rencana Aksi Kegiatan Prioritas (KP) 2 yang menempatkan penguatan peran dan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, setara, dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan harus berlangsung secara sistematis, lintas sektor, dan berkelanjutan, dengan dukungan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan perempuan berkembang secara optimal.

Mahkamah Agung sejak tahun 2021 bekerjasama dengan beberapa mitra Pembangunan seperti Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan International Court of Justice (ICJ) secara rutin mengadakan webinar internasional mengenai peningkatan kepemimpinan perempuan di peradilan. Webinar yang mengundang Mahkamah Agung dari negara lain dan International Association of Women Judges (IAWJ) tersebut membahas bagaimana perempuan di lembaga peradilan masih menghadapi tantangan struktural dalam pengembangan karir dan bertukar pengalaman mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menerapkan pengarusutamaan gender dan meningkatkan peran kepemimpinan

perempuan. Tantangan-tantangan ini termasuk budaya kerja yang cenderung maskulin, hambatan akses ke promosi, dan beban ganda peran publik dan domestik.

Pada bulan Mei 2023, Delegasi Hakim Perempuan dari Mahkamah Agung Indonesia yang mewakili seluruh lingkungan peradilan menghadiri Konferensi Dua Tahunan IAWJ di Marrakesh pada bulan Mei 2023 atas dukungan MARI dan AIPJ2, untuk mempresentasikan mengenai perkembangan kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia dan hasil survey kepemimpinan perempuan yang mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi oleh hakim perempuan yang juga dialami di lembaga peradilan negara lainnya.

Mahkamah Agung RI dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyadari tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan, sehingga dengan dukungan pimpinan Mahkamah Agung RI, IKAHI mendirikan wadah khusus untuk hakim perempuan dengan nama Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) pada tanggal 27 September 2023 dan BPHPI secara resmi diluncurkan pada tanggal 12 Januari 2024 oleh MA-RI dengan mandat utama untuk memperkuat peran dan kepemimpinan hakim perempuan. Sejak berdirinya, BPHPI telah secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan MA-RI, termasuk mempromosikan kebijakan kesejahteraan menyeluruh di lingkungan peradilan, dan pemberdayaan hakim perempuan melalui program pendampingan (mentoring) untuk hakim perempuan. BPHPI juga aktif dalam memperluas jejaring dengan menjadi anggota dan berpartisipasi dalam International Association of Women Judges (IAWJ) dan berbagi pengetahuan serta bekerjasama dengan peradilan dari negara lain, misalnya dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA), Federal Court of Australia (FCA) dan organisasi internasional lain seperti UNDP.

Di sisi lain, Pemerintah Australia memiliki kepedulian yang sama untuk meningkatkan perempuan dalam kepemimpinan dengan peluncuran *Working for Women: A Strategy for Gender Equality* pada tanggal 7 November 2024.¹ Strategi ini berfokus pada kepemimpinan, representasi, dan pengambilan keputusan, dengan jalur menuju kemajuan dalam 10 tahun ke depan. Strategi ini dikembangkan dengan mendengarkan suara berbagai komunitas dan kelompok, termasuk kelompok advokasi perempuan, bisnis, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Melalui *Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3* (AIPJ3), BPHPI bekerjasama sama dalam meningkatkan kesempatan dan kemampuan hakim perempuan di institusi peradilan di bawah *Strategy Women in Leadership*.

PERJALANAN 3 TAHUN BPHPI

Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan AIPJ2 dalam mempromosikan *women in leadership* dimulai pada tahun 2020 di bawah kerangka kerjasama di bidang peradilan antara MARI dengan *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA) melalui dialog yudisial tahunan, pertukaran data, pengetahuan, dan pengalaman dalam mendorong inisiatif kepemimpinan perempuan dalam peradilan. Dialog tersebut membahas bagaimana perempuan dalam lembaga peradilan menghadapi tantangan struktural dalam membangun karir mereka yang meliputi budaya kerja, beban ganda antara peran profesional dan domestik, serta stereotip tentang kemampuan dan kepemimpinan perempuan serta bagaimana mengatasi hambatan dalam pengembangan potensi perempuan dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai hakim, serta hambatan yang membatasi kontribusi mereka terhadap posisi kepemimpinan strategis di dalam peradilan.

Dengan dukungan pimpinan Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), BPHPI lahir sebagai forum khusus untuk hakim perempuan, di bawah naungan IKAHI, pada tanggal 27 September 2023 dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 12 Januari 2024 oleh MARI dan IKAHI. BPHPI didirikan dengan mandat utama untuk memperkuat peran dan kepemimpinan hakim perempuan. Sejak saat itu, BPHPI aktif terlibat dalam pembuatan

¹ Bekerja untuk Perempuan: Strategi untuk Kesetaraan Gender pada 7 November 2024, seperti diunduh dalam: <https://genderequality.gov.au/sites/default/files/2024-03/working-for-women-a-strategy-for-gender-equality.pdf>

kebijakan di MARI, termasuk mempromosikan kebijakan pendukung karier bagi perempuan, kesejahteraan peradilan, dan pemberdayaan hakim perempuan melalui program pendampingan untuk perempuan. BPHPI juga aktif memperluas jaringan dengan menjadi anggota dan berpartisipasi dalam *International Association of Women Judges* (IAWJ) serta berbagi pengetahuan dengan lembaga peradilan lain, termasuk Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), Federal Court of Australia (FCA), serta mengundang pembicara dari Mahkamah Agung Malaysia dan Asosiasi Hakim Perempuan Filipina berbicara dalam seminar yang diselenggarakan BPHPI, serta baru-baru ini memenuhi undangan diskusi dari hakim-hakim perempuan Negara Maladewa yang ingin mendirikan asosiasi hakim perempuan mengikuti jejak hakim perempuan di Indonesia yang memiliki BPHPI.

CAPAIAN BPHPI PERIODE 2024-2026

Sejak didirikan, BPHPI telah mencapai hal-hal berikut:

1. Membangun Jaringan Internasional
 - a. Menjadi narasumber Konferensi Regional Asia dan Pasifik 2024, International Association of Women Judges (IAWJ).
 - b. Menjadi Narasumber dalam Konvensi Nasional 2024 dari Philippine Women Judges Association (PWJA) pada 8-10 Mei 2024
 - c. Konferensi Internasional tentang Hak Pernikahan Perempuan, yang diselenggarakan oleh ABA ROLI dan MUSAWI di Kuala Lumpur pada 4-6 September 2024.
 - d. Konferensi Regional tentang "Mencapai Masyarakat yang Adil: Jalur Keadilan Inklusif untuk Manusia dan Planet di Asia dan Pasifik" di Pusat Konferensi PBB, Bangkok, Thailand pada 11-13 November 2024.
 - e. Konferensi IAWJ Asia dan Pasifik di Adelaide 13-15 Mei 2026.
 - f. Status *affiliate* pada IAWJ (on-going)
 - g. Sesi berbagi dengan Hakim Perempuan Maladewa dan UNDP Maladewa pada 14 September 2026
2. Program pengembangan kapasitas untuk hakim perempuan
 - a. Program Mentoring Angkatan pertama yang terdiri dari 15 mentor dan 29 mentee dari seluruh Indonesia yang mewakili 4 lingkungan badan peradilan.
 - b. Didukung oleh UNDP, BPHPI mengadakan Kolokium Kepemimpinan Yudisial untuk Hakim Perempuan di Indonesia pada 11-12 Agustus 2025 di Jakarta dengan mengundang 45 hakim perempuan terpilih. Kolokium ini merupakan bagian dari proyek regional *Shift Running: Promoting Women's Leadership in the Judiciary in Asia*, yang dilaksanakan di Indonesia, Thailand, Laos, dan Bangladesh di bawah UNDP dan Platform Keadilan Gender Global UN Women.
 - c. Mengirimkan 5 orang Hakim perempuan dari masing-masing badan peradilan dalam *Regional Convening on Women's Judicial Leadership in Asia Pacific*, 16-17 Oktober 2025.
3. Keterlibatan BPHPI dalam Penyusunan Kebijakan
 - a. Mendukung Penguatan Kebijakan Pengadilan Ramah Anak & Perempuan
Ketua Umum BPHPI ditugaskan oleh YM Ketua MARI untuk menghadiri penayangan film berjudul *Invisible Hopes*. Film *Invisible Hopes* menggambarkan tentang para tahanan dan napi perempuan yang hamil, menyusui dan memelihara anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. BPHPI menyampaikan usulan kepada Pimpinan MARI agar memprioritaskan waktu untuk bersidang lebih awal kepada para perempuan yang sedang hamil atau menyusui, baik dalam perkara pidana maupun perdata, serta memberikan payung hukum agar pengadilan dapat melaksanakan usulan BPHPI tersebut, setidaknya dalam bentuk SK KMA yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Draft SK KMA telah disusun, dan siap untuk dibahas dalam Forum Rapat Pimpinan (Rapim) MARI.

- b. Mendukung terwujudnya *Judicial Wellbeing*
BPHPI telah menyelenggarakan seminar internasional dengan menghadirkan Prof. Carly Schrever, seorang psikolog klinis dan lawyer yang menyampaikan bahwa hakim mempunyai potensi stres yang cukup tinggi (beban pekerjaan, tekanan di ruangan sidang, pembuatan putusan yang mengurangi jam istirahat, dan lainnya). Berdasarkan hasil diskusi tersebut, BPHPI menyadari perlunya kehadiran psikolog klinis dalam suatu lembaga. dan mengusulkan kepada Pimpinan MARI agar MARI sebagai percontohan menghadirkan psikolog klinis (paling tidak seminggu sekali), agar aparat peradilan di MARI bisa berkonsultasi jika mulai merasakan adanya stres yang mengarah ke depresi. Metode ini sebaiknya diterapkan pula pada pengadilan di bawah MARI, diawali dengan pengadilan-pengadilan di kota besar yang mempunyai beban pekerjaan yang berat.
- 4. Pengumpulan Data dan Survey
 - a. Didukung oleh AIPJ2, BPHPI melakukan survei persepsi yudisial untuk memajukan kepemimpinan perempuan di bidang peradilan pada tahun 2023, dengan melibatkan 4.792 hakim (33% perempuan, 67% laki-laki dari 93% pengadilan agama, 34% pengadilan umum, 63% pengadilan militer, dan 62% pengadilan administratif) berpartisipasi dalam survey tersebut. Hasil survei dipresentasikan pada Konferensi Biennial IAWJ di Marrakesh pada Mei 2023.
 - b. Didukung oleh JRTO, BPHPI melakukan survei daring pada 20 hingga 27 Januari kepada semua hakim perempuan, dan menerima umpan balik dari 690 hakim perempuan – di mana 63% di antaranya adalah hakim usia 35 hingga 50 tahun, 72% berasal dari pengadilan tingkat pertama, serta 28% dari pengadilan banding. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi hakim perempuan terkait minat, prioritas, frekuensi pertemuan, dan metode program pendampingan.
- 5. Kegiatan lainnya
 - a. Riset: diundang sebagai responden/sumber untuk Studi Dasar AIPJ2 tentang Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum (Agustus 2024)
 - b. Kegiatan sosial: Anggota BPHPI mengumpulkan dana sosial untuk membantu korban banjir di Batusangkar (Sumatera Selatan), Mei-Juni 2024 (link: <https://www.ikahi.or.id/detail/bphpi-peduli-banjir-bandang-sumbar>)

TUJUAN

Tujuan dari acara ini adalah:

1. Sebagai forum untuk berefleksi mengenai pencapaian BPHPI dari tahun 2024-2026 serta agenda dan tantangan ke depan.
2. Mengundang mitra kunci BPHPI dari Lembaga peradilan lain, Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan untuk memberikan ucapan selamat dan tanggapan atas pencapaian BPHPI serta agenda ke depan.
3. Menyenggarakan seminar singkat mengenai Hakim Perempuan di Era Digital: Penggunaan Teknologi Digital dan AI yang Bertanggung Jawab dan Inklusif.

AGENDA KEGIATAN DAN UNDANGAN

Acara ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Oktober 2026

Waktu : 08.00 – 11.00 WIB

Tempat :

Offline : Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia

Online : Meeting ID: 948 1672 7780

Passcode : 084229

Acara akan dilakukan dalam format hybrid yang akan mengundang pimpinan Mahkamah Agung RI, pimpinan IKAHI, perwakilan pengurus BPHPI dan hakim perempuan serta mitra pembangunan seperti AIPJ3, ADB, UNDP, dan UN Women.

SUSUNAN ACARA

- 1. Registrasi**
- 2. Pembukaan oleh MC**
- 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne IKAHI**
- 4. Pembacaan Doa**
Firris Barlian, S.Ag., M.H., Hakim Yustisial Kamar Agama
- 5. Laporan Ketua Panitia**
Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum., Sekretaris BPHPI
- 6. Sambutan Ketua BPHPI dilanjutkan dengan Presentasi Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI**
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Ketua BPHPI
- 7. Video Perjalanan 3 Tahun BPHPI**
- 8. Respon**
The Hon. Justice Elizabeth (Liz) Boyle, FCFCOA
- 9. Video Ucapan Selamat** dari lembaga peradilan negara lain dan Kementerian/Lembaga mitra BPHPI
- 10. Sambutan Ketua Umum IKAHI**
Yang Mulia Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.
- 11. Keynote Speech**
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sekaligus **membuka acara seminar**
- 12. Penyerahan Plakat/Cinderamata**
- 13. Foto Bersama**
- 14. Seminar**
Tema: *Hakim Perempuan di Era Digital: Penggunaan Teknologi Digital dan AI yang Bertanggung Jawab dan Inklusif*
Moderator: Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. dan Dr. Dewi Asimah, S.H., M.H.
- 15. Pengantar Moderator**
- 16. Paparan Materi I**
Hakim Perempuan di Era Digital: Penggunaan Teknologi Digital dan AI yang Bertanggung Jawab dan Inklusif
Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- 17. Paparan Materi II**
Human Judgment in the Age of AI Menjaga Objektivitas dan Kemanusiaan dalam Pengambilan Keputusan Hakim
Dr. Nathanael Enadus Johaness Sumampouw, M.Psi, M.Sc. Ph.D., Psikolog

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

18. Tanya Jawab

19. Penyerahan Plakat/Cinderamata

20. Penutup

21. ISHOMA

DAFTAR PESERTA DAN PANITIA

Peradilan Umum

Panitia

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
2.	Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
3.	Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Riau
4.	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
5.	Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6.	Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah agung
7.	Harika Nova Yeri, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8.	Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9.	Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
10.	Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
11.	Selviana Purba, S.H., LL.M., Ph.D.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
12.	Samsiati, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
13.	Aryaniek Andayani, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
14.	Dr. Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
15.	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
16.	Nurhuda, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
17.	Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
18.	Eva Margaretha Manurung, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung

No	Nama	Jabatan
19.	Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Humas Mahkamah Agung

Peserta

No	Nama	Jabatan
1.	Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
2.	Susilowati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
3.	Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
4.	Budi Hapsari, S.H., M.H.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
5.	Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6.	Masye Kumaunang, S.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
7.	Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
8.	Endang Lestari, S.H., M.Kn.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
9.	Rechtika Dianita, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
10.	Ayu Amelia, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
12.	Irma Mardiana, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
13.	Fiona Irnazwen, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
14.	Yuanita Tarid, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung
15.	Imelda Merlina Sari, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Ditjen Badilum
16.	Lucia Ridayanti, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Humas MA RI
17.	Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Humas MA RI
18.	Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang
19.	Lucy Ermawati, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
20.	Ria Helpina, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
21.	Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
22.	Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

23.	Wini Noviarini, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
24.	Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
26.	Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
27.	Merry Harianah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Depok

Peradilan Agama

Panitia

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2.	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
3.	Firris Barlian, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar Agama
4.	Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Agama Wonosari
5.	Indriyani Nasir, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar Agama
6.	Dr. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A.	Hakim Yustisial pada Kamar Agama

Peserta

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Dra. Ernida Basry, M.H.	Hakim Tinggi pada BSDK
2.	Dr. Tamah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pemilah pada Kamar Agama
3.	Dra. Hj. Suhaimi, M.H.	Hakim Tinggi Pemilah pada Kamar Agama
4.	Dr. Dra. N. Siti Suwaebah, M.H.	Hakim Tinggi pada BSDK
5.	Dr. Dra. Nurwaton, S.H., M.H.	Hakim Tinggi pada BSDK
6.	Dra. Orba Susilowati, M.H.I.	Hakim Tinggi Bawas
7.	Dr. Yuni Faizah, S.Ag, S.H., M.Si.	Hakim Tinggi PTA Bali
8.	Dr. Dra. Ida Nursaadah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTA Banten
9.	Dr. Dra. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PTA Bandung
10.	Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.	Ketua PA Jakarta Utara

No	Nama	Jabatan
11	Dede Rika Nurhasanah, S.Ag, M.H.	Hakim PA Jakarta Selatan
12.	Dra. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua PA Tangerang
13.	Dra. Taslimah, M.H.	Hakim PA Jakarta Timur
14.	Susilawati, S.E.I.	Hakim PA Jakarta Utara
15.	Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.	Hakim Yustisial Kamar Agama
16.	Dra. Nurhayati, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
17.	Dra. Sahriyah, S.H., M.S.I.	Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
18.	Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama/Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi Badan Peradilan Agama
19.	Dra. Nurhayati, M.H.	Hakim PA Jakarta pusat

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Panitia

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
2.	Anita Linda Sugiarto, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar TUN
3.	Febrina Permadi, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4.	Dr. Dewi Asimah, S.H., M.H.	Ketua PTUN Bengkulu
5.	Dyah Widiastuti, S.H., M.H.	Ketua PTUN Surabaya

Peserta

No	Nama	Jabatan
1.	Fitriamina, S.H., M.H.	PT TUN Jakarta
2.	Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar TUN
3.	Retno Widowati, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar TUN
4.	Malahayati, S.H.	Hakim Yustisial pada Kamar TUN
5.	Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

No	Nama	Jabatan
		Jakarta
6.	Ikawati Utami, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
7.	Listyorani Imawati, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
8.	Retno Nawangsih, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
9.	Retno Aryani, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Kamar TUN

Peradilan Militer

Panitia

No	Nama	Jabatan
1.	Mayjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H.	Dilmiltama
2.	Marsma TNI Syf. Nursiana, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Banding B
3.	Letkol CHK (K) Silveria Supanti, S.H., M.H.	Wakil Kepala Pengadilan Militer

Peserta

No	Nama	Jabatan
1.	Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H.	Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama
2.	Kolonel Chk (K) Farma Nihayatulla S.H., M.H.	Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
3.	Kolonel CHk (K) Prastiti Siswayani, S.H., M.H.	Pokkimilti Golongan IV Dilmilti II Jakarta
4.	Letkol Chk (K) Ferry Budi Setyanti, S.H., M.H.	Pokkimil Golongan V Pengadilan Militer II-06 Jakarta
5.	Mayor Chk (K) Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.	Pokkimil Golongan V Pengadilan Militer II-06 Jakarta

